

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Mengacu pada hasil penelitian, praktik GPR Pemkab Banyumas untuk mendukung kebijakan Program Strategis Nasional (PSN) oleh dua unit kerja, yakni pada Sub Koordinator Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Banyumas serta Subbagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokompim) Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas. Kedua unit kerja tersebut memiliki perannya masing-masing dalam mendukung kebijakan PSN, di mana Dinkominfo Banyumas yang berperan sebagai “humas daerah” Kabupaten Banyumas pada fungsi manajerial dan teknis, sedangkan Subbag Prokompim menjalankan peran sebagai “humas pimpinan” Kabupaten Banyumas pada fungsi teknis.

Praktik-praktik yang dilakukan GPR Pemkab Banyumas dalam mendukung kebijakan PSN di antaranya:

1. Melakukan diseminasi informasi mengenai tujuan, sasaran, manfaat, ketentuan, hingga aspek operasional kebijakan PSN melalui berbagai saluran komunikasi;
2. Memfasilitasi dan melakukan koordinasi lintas OPD pendukung PSN;
3. Melakukan monitoring publik mengenai kebijakan PSN melalui analisis media dan sentimen publik;
4. Memfasilitasi aspirasi masyarakat mengenai kebijakan PSN melalui Lapak Aduan, dan
5. Melakukan dokumentasi dan publikasi giat pimpinan daerah terkait dengan kebijakn PSN.

Hasil penelitian di lapangan mengindikasikan peran manajerial GPR Pemkab Banyumas masih menghadapi keterbatasan seiring dengan sistem kebijakan yang hierarkis. Dalam kata lain, kebijakan yang hendak didukung dalam konteks ini tidak sepenuhnya berada di bawah kendali Pemkab Banyumas. Oleh karenanya, praktik GPR untuk mendukung kebijakan PSN tidak terlaksana dari tahap perumusan kebijakan, tetapi dimulai dari tahap implementasi kebijakan. Pelaksanaan komunikasi publik yang dilakukan oleh GPR Pemkab Banyumas pun telah mengarah pada

komunikasi dua arah melalui penyediaan Lapak Aduan dan monitoring opini publik. Meskipun demikian, komunikasi publik ini belum benar-benar berorientasi pada “kesetaraan” kedudukan sebagai pihak yang terlibat dalam kebijakan PSN. GPR Pemkab Banyumas cenderung melakukan *model public information* dan *two-way asymmetrical* dalam rangka memastikan masyarakat terpapar dengan kinerja pemerintah dalam kebijakan PSN.

Dengan demikian, praktik GPR Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam mendukung kebijakan PSN dapat dipahami sebagai praktik komunikasi Pemerintah Kabupaten Banyumas yang terorganisasi secara struktural dan koordinatif, namun implementasi di lapangan GPR belum berkontribusi secara strategis dalam pengambilan keputusan organisasi karena kebijakan PSN memiliki sistem yang bersifat hierarkis.

B. Saran

Atas pertimbangan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, berikut adalah saran dan rekomendasi dari penelitian ini.

1. GPR Pemerintah Kabupaten Banyumas

Secara praktis, GPR Pemkab Banyumas masih dapat memaksimalkan upaya-upaya komunikasi publik yang telah dilaksanakan. Seperti halnya mendiseminasikan informasi PSN yang lebih informatif dan interaktif, agar kepercayaan yang timbul dari sasaran kebijakan, yakni masyarakat Banyumas, terdorong untuk terlibat dalam implementasi kebijakan. Selain itu, meskipun publik belum ditempatkan pada posisi yang setara, tetapi GPR Pemkab Banyumas dapat memanfaatkan aspirasi masyarakat Banyumas pada kebijakan PSN untuk menjadi penyokong informasi evaluatif bagi kebijakan yang justru dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas, yakni Kebijakan Trilas Program. Dalam hal ini, GPR Pemkab Banyumas dapat mengumpulkan segala informasi yang terjadi di lapangan dan meneruskan informasi tersebut dalam forum pengambilan keputusan pada tingkat daerah. Dengan demikian, GPR Pemkab Banyumas sebagai mediator dapat menyelaraskan kinerja pemerintah daerah yang semakin berorientasi pada kondisi di lapangan.

2. Penelitian Selanjutnya

Secara teoritis, penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan untuk mengetahui dan menganalisis praktik *government public relations* pemerintah daerah untuk mendukung kebijakan Program Strategis Nasional (PSN) dengan subjek penelitian berbeda, yakni pemerintah daerah selain Pemerintah Kabupaten Banyumas. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, penelitian selanjutnya akan senantiasa berkontribusi pada perkembangan penelitian mengenai praktik GPR dalam mengomunikasikan kebijakan pemerintah secara lebih eksploratif. Selain itu, penelitian selanjutnya pun dapat mempertimbangkan untuk meneliti fokus atau isu yang lebih spesifik dari penelitian ini. Misalnya, penelitian pada aspek strategi komunikasi ataupun komunikasi krisis pada GPR untuk mendukung kebijakan PSN di pemerintah daerah.

